

GROUND BREAKING NEUTRADC HYPERSCALE DATA CENTER

Wamen BUMN II Kartika Wirjoatmodjo (tengah) bersama Direktur Utama Telkom Ririk Adriansyah (kiri) dan CEO Singtel Yuen Kwang Moon (kanan) berbincang usai pelaksanaan kegiatan ground-breaking NeutraDC Hyperscale Data Center Batam di Kabil Integrated Industrial Estate, Batam, Kepulauan Riau, Rabu (21/12). Pembangunan data center berkapasitas 51 MW dengan total nilai proyek sekitar 198 juta dolar AS itu ditargetkan beroperasi pada kuartal II 2024.



FOTO: ANTARA

Sri Mulyani: Kebijakan Fiskal Dorong Perbaikan Sumber Perekonomian

Pada 2023, pemerintah perlu menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga agar investasi dapat tetap tumbuh sekitar 6 sampai 7 persen secara tahunan.

JAKARTA (IM) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan kebijakan fiskal akan dilakukan guna mendorong perbaikan fundamental bagi sumber pertumbuhan ekonomi, terutama yang dipengaruhi oleh faktor dalam negeri.

"Hal ini seperti dengan menjaga konsumsi masyarakat, menarik investasi dan membuat insentif untuk meningkatkan daya saing produk

ekspor," kata Sri Mulyani dalam seminar Outlook Perekonomian Indonesia 2023 di Jakarta, Rabu (21/12).

Dilansir dari *Antara*, Sri Mulyani menyebutkan kebijakan fiskal akan terus diperbaiki, termasuk dengan meningkatkan kualitas belanja pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ke depan efektivitas belanja pemerintah pusat dan daerah tidak hanya dilihat dari kuantitas peny-

lurannya.

"Saya lihat pemerintah daerah terus menyalurkan belanjanya dan aktivitas ekonomi daerah juga sudah kembali bergerak yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi," katanya.

Pada 2023, pemerintah perlu menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga agar investasi dapat tetap tumbuh sekitar 6 sampai 7 persen secara tahunan.

"Suku bunga acuan meningkat secara global, ini akan memengaruhi *appetite* dan risiko investasi. Kita harus bekerja keras untuk menjaga investasi agar tumbuh 6 sampai 7 persen," katanya.

APBN juga akan digunakan untuk menjadi *shock absorber* bagi konsumsi masyarakat sehingga pemerintah menganggarkan Rp470 triliun untuk bantuan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan.

Pada saat yang sama, pemerintah akan tetap menjaga

defisit APBN agar berada di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), dimana di 2022 defisit APBN telah mencapai 2,49 persen dari PDB atau di bawah target 4 persen dari PDB.

Pada saat itu Sri Mulyani Indrawati juga menyebut Indonesia perlu melakukan diversifikasi negara tujuan ekspor pada 2023 di tengah pelemahan ekonomi global. "Kita harus mampu melakukan diversifikasi negara tujuan ekspor pada 2023," katanya.

Negara-negara tujuan ekspor utama Indonesia seperti Amerika Serikat dan RRT berpotensi mengalami pelemahan perekonomian yang berpotensi menurunkan permintaan terhadap ekspor pada 2023.

Karena itu ia memperkirakan ekspor nasional akan mengalami pelemahan pertumbuhan pada 2023 dibandingkan 2022 dimana ekspor bisa tumbuh hingga 20 sampai 30 persen secara tahunan.

"Ekspor akan mengalami normalisasi karena baseline-nya sudah tinggi sehingga pada 2023 pertumbuhan ekspor tidak akan bertahan karena lingkungan global, tapi tidak berarti kita menyerah," katanya.

Menurutnya negara seperti India perlu terus dibidik menjadi tujuan ekspor utama karena mulai membuka diri setelah melakukan reformasi kebijakan. "Ekspor ke Timur Tengah juga bertumbuh. Karena harga minyak sebagai komoditas unggulan mereka sedang tinggi, mereka perlu diperhitungkan menjadi negara tujuan ekspor," imbuhnya.

Menurutnya perekonomian global pada 2023 semakin sulit diprediksi karena kondisi geopolitik seperti perang Rusia dengan Ukraina yang menimbulkan ketidakpastian yang sulit dihitung. ● **dro**

Program PC-PEN Akselerasi Pemulihan Kinerja Sektor Manufaktur

JAKARTA (IM) - Upaya pemulihan kinerja sektor industri manufaktur akibat gonggong pandemi Covid-19 dilakukan pemerintah melalui berbagai upaya strategis dan koordinasi yang baik melalui program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).

"Kami mengapresiasi kerja keras Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) di bawah pimpinan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Airlangga Hartarto," kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada acara Peluncuran Buku Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Jakarta, kemarin.

Dikutip dari laman Kemenperin, Rabu (21/12), Agus mengemukakan, saat masa pandemi Covid-19, industri manufaktur merupakan sektor dengan ketahanan yang relatif lebih tinggi dan terbukti mampu pulih secara lebih cepat daripada sektor lainnya.

"Seluruh pemulihan dan kinerja yang baik ini berlangsung sampai dengan hari ini. Hal ini antara lain mencerminkan kepercayaan masyarakat industri yang kuat terhadap upaya pemulihan ekonomi nasional dan efektivitas program PC-PEN," paparnya.

Agus menyampaikan, sejak awal masa kedaruratan pandemi Covid-19, pemulihan ekonomi merupakan isu pokok dalam penanganan pandemi covid-19 selain isu penanganan kesehatan masyarakat.

"Program PC-PEN memilih strategi yang terbukti tepat sasaran dengan mengutamakan keseimbangan antara penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional dalam penanganan pandemi COVID-19, yakni ibarat kombinasi yang pas antara rem dan gas," jelasnya.

Untuk itu, demi menjaga keberlangsungan aktivitas sektor manufaktur, melalui koordinasi dengan KPC-PEN, Kementerian Perindustrian menerapkan kebijakan perizinan untuk kegiatan industri pada masa kedaruratan kesehatan masyarakat melalui Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2020 tentang

Ijin Operasional Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI).

Melalui penerbitan IOMKI tersebut, perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya selama masa kedaruratan kesehatan masyarakat dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

"Pengawasan terhadap pelaksanaan IOMKI ini melibatkan berbagai pihak secara luas," ujar Agus.

Di samping itu, dukungan Kemenperin terhadap program vaksinasi Covid-19 yang dikoordinasikan oleh KPC-PEN, antara lain dengan penerbitan surat edaran vaksinasi dosis ketiga (*vaccine booster*) bagi pekerja industri dan kawasan industri melalui Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2022 dalam rangka percepatan vaksin booster sektor industri secara bertahap sampai dengan akhir tahun 2022.

Selanjutnya, Kemenperin menginisiasi kebijakan insentif berupa diskon Pajak Penjualan Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) bagi mobil.

Hal ini berangkat dari pemahaman bahwa industri otomotif merupakan salah satu subsektor penting yang memiliki *backward* dan *forward linkage* yang besar, sehingga dapat menjadi penyanga bagi pemulihan ekonomi.

Kemenperin mencatat, saat masa pandemi, kinerja penjualan mobil peserta PPnBM DTP pada Maret-Desember 2021 sebanyak 519 ribu unit atau meningkat sebesar 113% (275 ribu unit) dari periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ini berkontribusi cukup besar terhadap pertumbuhan industri alat angkutan pada triwulan II dan III tahun 2021 masing-masing sebesar 45,2% (yoy) dan 27,8% (yoy).

"Selain itu, dalam proses manufakturnya, peserta program PPnBM DTP telah melibatkan sebanyak 319 perusahaan industri komponen Tier 1, dan tentunya hal ini mendorong peningkatan kinerja industri komponen Tier 2 dan 3 yang sebagian besar termasuk kategori industri kecil dan menengah (IKM)," imbuhnya. ● **pan**

BI Perkirakan Rupiah Menguat pada 2023

JAKARTA (IM) - Bank Indonesia (BI) memperkirakan Rupiah akan menguat pada 2023, karena ketidakpastian global menurun setelah bank sentral Amerika Serikat The Fed berhenti menaikkan suku bunga acuan pada kuartal I 2023.

"*Capital account* akan masuk, begitu pula PMA (Penanaman Modal Asing) dan portofolio investasi. Sehingga kami perkirakan nilai tukar Rupiah (NTR) ke depan akan cenderung menguat ke arah fundamental," kata Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam Seminar Outlook Ekonomi Indonesia 2023 di Jakarta, Rabu (21/12).

Perry mengatakan, kurs Rupiah pada 2022 mengalami pelemahan karena Dolar AS menguat terhadap hampir seluruh mata uang dunia

dan The Fed menaikkan suku bunga secara agresif.

BI juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan berkisar pada 4,5 sampai 5,3 persen dan inflasi akan kembali ke bawah 4 persen atau hanya sekitar 3 persen secara tahunan di 2023.

"Tahun depan, begitu ketidakpastian ekonomi global mereda berbagai faktor akan menguat kembali ke fundamental. Kredit juga akan terus kami dorong hingga tumbuh 11 sampai 12 persen sampai tahun berikutnya," ucapnya.

Untuk itu, Bank Indonesia mengatakan akan terus membuat kebijakan moneter yang mendukung stabilitas sistem keuangan dan melanjutkan sinergi dengan pemerintah untuk menjaga inflasi inti di bawah 4 persen, antara lain me-

lalui insentif untuk sektor pangan.

"Jadi kami tidak harus merespons dengan menaikkan suku bunga acuan secara berlebihan dan agresif seperti Amerika Serikat dan negara lain. Kami pastikan inflasi inti bisa kembali ke bawah 4 persen di semester I 2023," ucapnya.

Bank Indonesia juga akan melanjutkan digitalisasi sistem pembayaran dengan merchant pengguna QR Indonesian Standard (QRIS) yang diharapkan mencapai 45 juta pada 2023 dan 80 persen di antaranya merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). "Untuk Keketuaan ASEAN 2023, QRIS payment akan diperluas untuk dapat digunakan oleh ASEAN five sehingga *cross border connectivity* terbangun," kata Perry. ● **dot**

FOTO: ANTARA



PEMBELIAN SAHAM TOL LAYANG MBZ

Dirut PT Jasa Marga (Persero) Tbk Subakti Syukur (kedua kanan) bersama Dirut PT Margautama Nusantara Danni Hasan (kedua kiri), Dirjen Pembiayaan Infrastructure Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna (kiri), dan Kepala BPJT Danang Parkesit (kanan) melakukan penyerahan akta jual beli saham PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek (JJC) di Jakarta, Rabu (21/12/2022). Anak Usaha PT Nusantara Infrastructure Tbk di sektor jalan tol, PT Margautama Nusantara membeli 40 persen kepemilikan saham PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek (PT JJC), anak usaha PT Jasa Marga (Persero) Tbk yang mengelola Jalan Layang Mohamed Bin Zayed (MBZ).

BPR SUPRA

PULAUINTAN
General Contractor

PT. INDOCHEMICAL CITRA KIMIA
Solvents, Industrial and Specialty Chemicals

Kementerian PUPR Tawarkan Dua Proyek Saluran Irigasi

JAKARTA (IM) - Kementerian PUPR melakukan penajakan pasar untuk 2 Proyek Saluran Irigasi di Sumatera Selatan dan Lombok melalui skema KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha). Adapun total proyek yang ditawarkan senilai Rp3,24 triliun.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Herry Trisaputra Zuna mengungkapkan, proyek KPBU Unsolicited Daerah Irigasi Komerling berada di Sumsel, sedangkan proyek Saluran Interkoneksi High Level Diversion (HLD) di Wilayah Sungai di Lombok.

Menurutnya kegiatan Market Sounding ini merupakan upaya untuk meningkatkan pembiayaan melalui optimalisasi pemanfaatan sumber pendanaan non-pemerintah yang dapat memberikan daya ungkit (*leverage*) melalui skema KPBU.

"Beberapa strategi yang dilakukan pemerintah melalui skema KPBU meliputi Percepatan skema delivery, Pembentukan fund Variable Capital Company (VCC), Pengupayaan staple financing untuk mempercepat pemenuhan pembiayaan (*financial close*), Penerapan estafet *financing*, Pengupayaan partisipasi badan usaha sejak tahap inisiasi proyek melalui skema KPBU unsolicited, serta Pengembangan skema KPBU syariah," kata Herry pada pernyataan tertulisnya, kemarin.

Proyek KPBU Unsolicited Daerah Irigasi Komerling di Sumsel dan Saluran Interkoneksi High Level Diversion (HLD) Wilayah Sungai di Lombok memiliki Capex sebesar Rp1,618 triliun untuk Proyek KPBU Unsolicited Daerah Irigasi Komerling, dan Rp1,623 triliun untuk Proyek KPBU Unsolicited Saluran Interkoneksi High Level Diversion (HLD) Wilayah Sungai Lombok. Kedua proyek ini juga merupakan pilot project KPBU Syariah Bidang PUPR di Indonesia.

Herry berharap pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi melalui skema KPBU dapat menjadi alternatif solusi terhadap permasalahan irigasi yang terjadi di Indonesia untuk mendukung terwujudnya layanan irigasi yang lebih optimal.

"Melalui pelaksanaan Market Sounding ini diharapkan dapat diperoleh masukan dan tanggapan dari badan usaha dan lembaga pembiayaan, maupun *stakeholders* lainnya seperti Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, agar dapat menghasilkan Studi Kelayakan yang lebih komprehensif dan dapat menarik minat pasar untuk berinvestasi," pungkash Herry. ● **dot**

Totalindo Raih Kontrak Baru Rp1,3 Triliun

JAKARTA (IM) - PT Totalindo Eka Persada Tbk (TOPS) atau Totalindo mencatat kontrak baru senilai Rp1,3 triliun di penghujung tahun 2022. Kontrak baru tersebut meroket hingga 331,33% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Proyek-proyek kontrak baru perseroan tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia. Selain itu, perseroan masih menjadi kepercayaan di kawasan Jabodetabek, dengan sejumlah proyek antara lain Sky House Alam Sutera dan Soll Marina Hotel and Office di Tangerang Selatan, serta Ball Room MNC Center di Jakarta.

"Raihan nilai kontrak baru tahun ini harus disyukuri dan dijadikan motivasi bagi untuk terus meningkatkan kinerja perseroan di tahun depan," kata Wakil Direktur Utama TOPS Salomo Sihombing dalam keterangan resminya, Rabu (21/12).

Pendapatan kontrak baru Totalindo juga selaras dengan kinerja keuangan kuartal III tahun ini, di mana perseroan berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp562 miliar atau meningkat 25% dibandingkan tahun lalu.

Selain itu, Totalindo juga membukukan kenaikan laba sebesar Rp1,13 miliar atau naik 58% dibandingkan periode yang sama

Interkoneksi High Level Diversion (HLD) Wilayah Sungai di Lombok memiliki ruang lingkup revitalisasi/rehabilitasi saluran irigasi, modernisasi irigasi melalui implementasi Smart Water Management, operasi dan pemeliharaan, kajian alokasi air dan Smart Water Management serta penguatan sosial dan kelembagaan.

Kedua proyek ini masing-masing memiliki Capex sebesar Rp1,618 triliun untuk Proyek KPBU Unsolicited Daerah Irigasi Komerling, dan Rp1,623 triliun untuk Proyek KPBU Unsolicited Saluran Interkoneksi High Level Diversion (HLD) Wilayah Sungai Lombok. Kedua proyek ini juga merupakan pilot project KPBU Syariah Bidang PUPR di Indonesia.

Herry berharap pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi melalui skema KPBU dapat menjadi alternatif solusi terhadap permasalahan irigasi yang terjadi di Indonesia untuk mendukung terwujudnya layanan irigasi yang lebih optimal.

"Melalui pelaksanaan Market Sounding ini diharapkan dapat diperoleh masukan dan tanggapan dari badan usaha dan lembaga pembiayaan, maupun *stakeholders* lainnya seperti Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, agar dapat menghasilkan Studi Kelayakan yang lebih komprehensif dan dapat menarik minat pasar untuk berinvestasi," pungkash Herry. ● **dot**

Totalindo Raih Kontrak Baru Rp1,3 Triliun

Hasil tersebut membuat perseroan optimis dalam menghadapi tahun 2023, sekaligus membuktikan bahwa Totalindo berhasil menjaga reputasi sebagai perusahaan konstruksi swasta terkemuka di kancan nasional, karena masih dipercaya oleh para mitra dan pelanggannya di masa pandemi.

Salomo mengungkapkan bahwa, perseroan telah menyiapkan strategi untuk meningkatkan kinerja pada 2023, mulai dari penguatan strategi bisnis kantor cabang, diversifikasi usaha, mengikuti proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), hingga menggandeng mitra bisnis guna memperkuat kinerja pendanaan perseroan.

"Kami yakin akan terus melanjutkan tren positif di tahun depan, melihat permintaan jasa konstruksi terus meningkat pasca pandemi," tuturnya.

Lebih jauh Salomo mengatakan, tahun 2023 merupakan tahun politik yang akan membuat industri konstruksi lebih cermat dalam membidik potensi-potensi proyek baru. Oleh karena itu, perseroan berupaya untuk lebih jeli dalam melihat peluang, utamanya dalam proyek-proyek yang dimiliki swasta. ● **hen**